

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan pada umumnya merupakan masalah yang kompleks atau multidimensi (Suryawati 2005). Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya terhambat oleh kemiskinan. Kemiskinan di negara ini merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah elemen yang saling terkait, seperti tingkat pendapatan, lokasi geografis, jenis kelamin, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap produk dan layanan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, diperlukan sejumlah inisiatif yang rumit. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan utama dalam *Millenium Development Goals (MDGs)*, yang diikuti oleh *Sustainable Development Goals (SDG's)* untuk tahun 2015–2030 (Sihombing et al., 2019).

Di negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan masalah yang umum terjadi. Tujuan suatu negara berkembang adalah memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah, kesadaran pemerintah daerah terhadap masalah kemiskinan akan meningkat, yang akan menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan strategis yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan. Maka pemerintahan daerah mulai dari tingkat kabupaten/ kota sampai tingkat provinsi diharapkan mampu menemukan faktor apa yang paling berperan dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di masing-masing daerah.

Langkah ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam bidang perekonomian (Oktaviana et al., 2021).

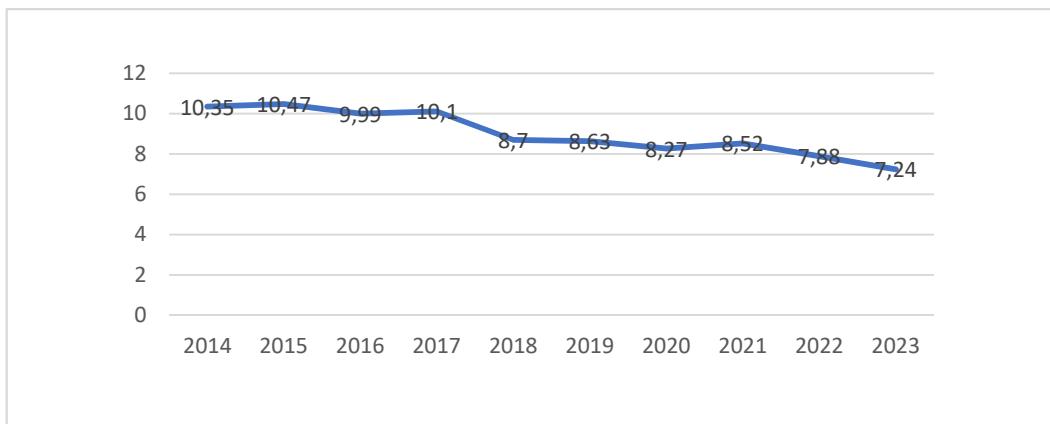
Salah satu tantangan yang terus-menerus dihadapi manusia adalah fenomena kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang telah ada sepanjang sejarah, dan dampaknya dapat memengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang, meskipun orang yang terdampak sering kali tidak menyadari keberadaannya. Kemiskinan merupakan kenyataan bagi mereka yang dianggap miskin karena mereka dapat benar-benar merasakan dan mengalami bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan. Namun, mereka mungkin tidak menyadari kemiskinan yang mereka alami. Hanya ketika mereka membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang-orang yang dikategorikan memiliki tingkat kehidupan sosial yang lebih baik, mereka akan menyadari betapa miskinnya mereka. Singkatnya, kemiskinan dicirikan oleh standar hidup yang rendah, yaitu tingkat kekurangan materi yang dialami oleh sejumlah individu atau kelompok dibandingkan dengan standar hidup yang umum di masyarakat yang bersangkutan. Taraf hidup yang rendah ini memberi pengaruh nyata terhadap kesehatan, moral, serta rasa percaya diri orang-orang yang hidup dalam kemiskinan (Suliswanto, 2010).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia menduduki tingkat kemiskinan mencapai angka 9,36 persen. Sejak Presiden Soekarno dan Joko Widodo menjabat, Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Masing-masing pemimpin memiliki cara tersendiri dalam menekan angka kemiskinan, walau hasilnya tidak selalu setara.

Kemiskinan masih menjadi fokus utama capaian pembangunan hingga saat ini. Arah strategi dan kebijakan pemerintah lebih terfokus pada indikasi tersebut karena banyaknya orang miskin yang belum beralih ke golongan pendapatan yang lebih baik. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lambatnya penurunan tingkat kemiskinan adalah kurangnya dukungan dari sektor industri sebagai penggerak, dari sektor kehutanan, perikanan, dan pertanian untuk menghasilkan nilai tambah yang maksimal. Penyebaran pelaku industri yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian turut mempengaruhi sebaran pendapatan antar masyarakat (Rahman et al., 2022).

Pematang Siantar yang kerap disebut Siantar, merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan. Letaknya yang strategis karena dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera menjadikan kota ini sebagai jalur penting lalu lintas. Berjarak sekitar 128 km dari Medan dan 52 km dari Parapat, Pematang Siantar sering menjadi kota persinggahan bagi wisatawan yang menuju Danau Toba. Kota ini memiliki beberapa sektor unggulan, antara lain perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor, sektor industri, serta usaha kontruksi. Keberadaan sektor-sektor unggulan tersebut berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan karena jika dilihat dari penelitian (Siburian et al., 2021), diketahui bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Dengan demikian, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan besar,

termasuk upaya pengurangan atau penghapusan kemiskinan. Oleh karena itu, sektor industri pengolahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi salah satu faktor penting dalam menurunkan angka kemiskinan. Berikut perkembangan kemiskinan Pematang Siantar pada Gambar 1.1:



Gambar 1. 1 Perkembangan Kemiskinan Pematang Siantar tahun 2014-2023

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2025

Keadaan kemiskinan 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi di tahun 2014 sampai 2018 sebesar 10,35 persen menjadi 8,7 persen, dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2020 menjadi 8,27 persen, tetapi ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 8,52 persen, hal ini tidak bertahan lama karena di tahun selanjutnya hingga tahun 2023 terus mengalami penurunan menjadi 7,24 persen. Walaupun pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi covid-19 termasuk Kota Pematang Siantar juga mengalami hal demikian tetapi jika di lihat bahwa kemiskinan pada tahun 2020 di Pematang Siantar malah mengalami penurunan, dimana angka kemiskinan yang turun dari 8,63 persen tahun 2019 menjadi 8,27 persen ditahun 2020. Dampak pandemi covid-19 di Pematang Siantar dapat di lihat pada tahun 2021 ditandai dengan meningkatnya

kemiskinan sebesar 8,52 persen tahun 2021 dan relatif semakin menurun ditahun 2022 hingga 2023.

Meningkatnya wabah covid-19 dari tahun 2020 mencapai puncak di tahun 2021 dimana berdampak terhadap lapangan pekerjaan yang minim, banyak karyawan yang mendapat PHK, serta pengusaha dan pedagang yang mengalami kesulitan karena daya beli masyarakat yang terbatas, sehingga melemahkan pendapatan perusahaan dan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menjalankan program bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak pandemi sehingga masyarakat masih bisa memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Kondisi ekonomi yang belum pulih, serta dampak penyebaran covid-19 yang semakin luas, banyak sektor masih terpengaruh sehingga penyerapan tenaga kerja semakin menurun bahkan sektor industripun tidak luput mengurangi jumlah tenaga kerja, sehingga pada tahun 2021 kemiskinan di Pematang Siantar relatif meningkat (Simanjuntak, 2022).

Menurut penelitian Erian (2022), fenomena kemiskinan seperti ini juga dialami oleh Kabupaten Simalungun. Peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2021 disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan akibat dampak pandemi COVID-19. Kondisi ini turut menyebabkan tingginya tingkat pengangguran serta kesulitan yang dialami oleh para pelaku usaha dan pedagang selama masa pandemi.

Ketika membicarakan tentang kemiskinan, beberapa faktor yang memiliki peran penting dalam perubahan tingkat kemiskinan dengan melihat sektor-sektor unggulan yang dimiliki Indonesia bahkan daerah. Badan Pusat Statistik

mengklasifikasikan sektor perekonomian dalam 17 kategori, diantaranya sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Kontruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi serta Perawatan Kendaraan Bermotor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta jasa lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), sektor pertanian dan industri merupakan dua sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian.

Wilayah Kota Pematang Siantar merupakan wilayah perkotaan yang kurang cocok untuk kegiatan sektor pertanian. Wilayah perkotaan lebih sesuai untuk aktivitas ekonomi sekunder seperti perdagangan, serta sektor tersier seperti industri dan jasa. Sektor industri di Kota Pematang Siantar memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena letaknya yang strategis, berada di pusat Kabupaten Simalungun sebagai daerah penyangga (hinterland) yang telah unggul dalam berbagai komoditas pertanian, sehingga mampu menyediakan bahan baku bagi industri. Ketersediaan tenaga kerja dengan beragam keterampilan serta dukungan infrastruktur seperti jalan, lembaga keuangan, SPBU, bengkel, pasar, dan lainnya menjadi keunggulan aglomerasi yang mendukung aktivitas industri. Selain itu, tersedia lahan seluas 240 hektar di Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, yang telah disiapkan untuk kawasan industri. Proses industrialisasi merupakan kelanjutan dari pembangunan ekonomi setelah sektor pertanian

berkembang. Industri memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan melalui investasi lanjutan (*induced investment*) dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme rangsangan pembangunan (*inducement mechanism*) yang terbentuk dari keterkaitan antara industri hulu dan hilir. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja di sektor industri menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor ini (Sinurat, 2007).

Sesuai dengan paparan RPJMD Tahun 2022–2027, pemerintah Kota Pematang Siantar dalam mendukung pengembangan industri dengan menyediakan kawasan industri seluas 573 Hektar yang berada pada kawasan Tanjung Pinggir, kawasan ini memiliki nilai strategis karena memiliki propsek pengembangan yang sangat besar untuk kedepannya, disamping cukup luas, kawasan ini juga terletak di kecamatan Siantar Martoba dan dekat dengan Terminal Tanjung Pinggir. Untuk memperlancar kegiatan pengembangan industrialisasi di wilayah Pematang Siantar, pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat prosedur perizinan penanaman modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri (Bappeda 2022).

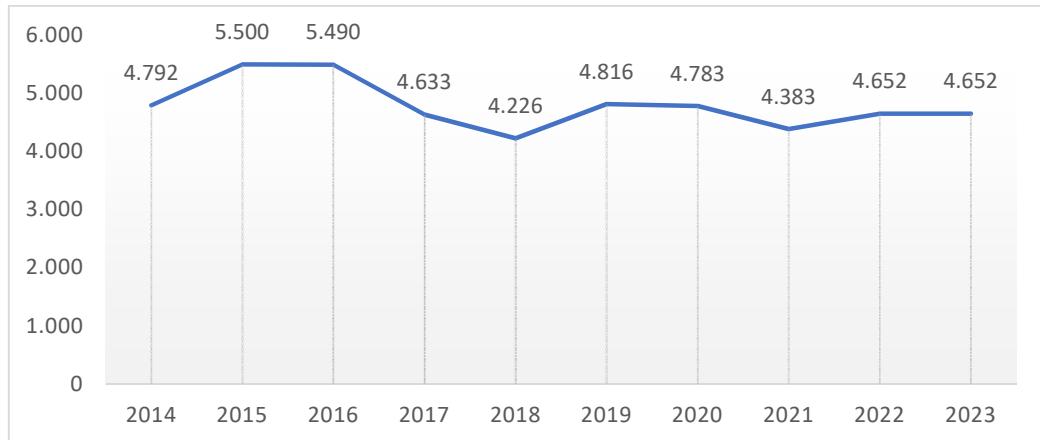
Secara teoritis, sektor industri berfungsi sebagai penggerak utama dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi karena memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Industrialisasi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan per kapita hingga mencapai level yang tinggi, disertai dengan pemerataan yang semakin baik dan tingkat ketimpangan yang rendah. Untuk mewujudkan hal tersebut, sektor industri perlu memberikan kontribusi

yang cukup tinggi terhadap perekonomian dan menjadi sektor yang kuat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal (Rahman et al., 2022).

Penyerapan tenaga kerja merujuk pada jumlah lapangan kerja yang telah terisi, yang tercermin dari banyaknya penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja tersebut tersebar di berbagai sektor ekonomi. Terserapnya tenaga kerja terjadi karena adanya kebutuhan atau permintaan dari dunia usaha terhadap tenaga kerja. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja dapat dianggap sebagai bentuk dari permintaan tenaga kerja (Hartono et al., 2018).

Mankiw dalam Arum (2016), menyatakan bahwa permintaan tenaga kerja merujuk pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang tersedia atau ditawarkan oleh para pencari kerja. Interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja inilah yang disebut sebagai penyerapan tenaga kerja. Berikut merupakan perkembangan penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri pada

Gambar 1.2:



Gambar 1. 2 Perkembangan Penyerapan TenagaKerja Sektor Industri Pematang Siantar tahun 2014-2023

Sumber : BPS Pematang Siantar, 2025

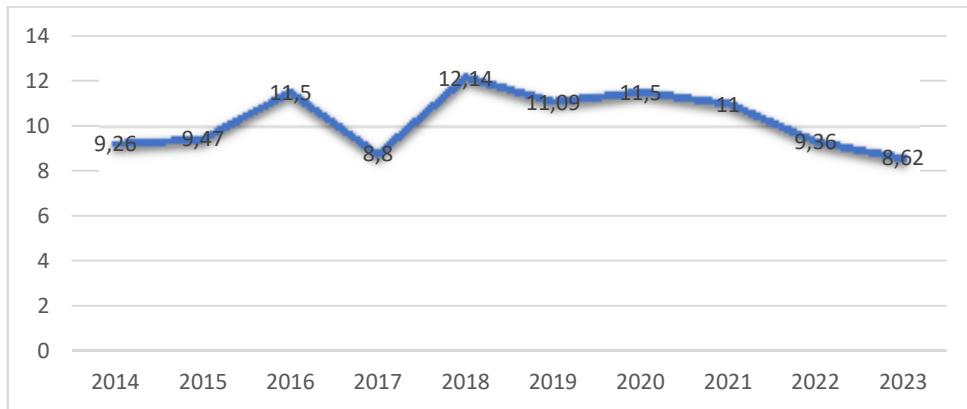
Penyerapan tenaga kerja sektor industri 10 tahun terakhir di Pematang Siantar mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2018. Penurunan terjadi dari tahun 2016 dan terendah di tahun 2018 menjadi 4.226 jiwa dan relatif mengalami kenaikan dan penurunan sampai ditahun 2023 penyerapan tenaga kerja di sektor industri di angka 4.652 jiwa di tahun 2023.

Pada tahun 2016, penyerapan tenaga kerja sektor industri mengalami penurunan menjadi 5.490 jiwa. Kondisi ini seharusnya mendorong peningkatan angka kemiskinan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya tingkat kemiskinan menurun dari 10,47 persen pada tahun 2015 menjadi 9,9 persen pada tahun 2016. Hal serupa juga tampak pada tahun 2020, dimana jumlah tenaga kerja yang terserap turun menjadi 4.783 jiwa dari 4.816 jiwa di tahun sebelumnya, namun angka kemiskinan kembali menunjukkan penurunan. Fenomena ini tidak sejalan dengan harapan yang menyatakan jika penyerapan tenaga kerja yang meningkat maka kemiskinan akan menurun. Sebaliknya jika penyerapan tenaga kerja menurun maka kemiskinan akan meningkat karena masyarakat yang tidak bekerja tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok.

Menurut penelitian yang dilakukan Arifin (2024) di Provinsi Riau, ditemukan bahwa penyerapan tenaga kerja sektor industri memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri, maka semakin rendah tingkat kemiskinan di Provinsi tersebut, dan sebaliknya jika penyerapan tenaga kerja menurun, tingkat kemiskinan cenderung meningkat.

Nidar (2012), menyatakan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja secara otomatis dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja dalam hal ini merujuk pada jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dalam suatu unit usaha tertentu. Dengan kata lain, penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah individu yang bekerja di dalam suatu usaha. Jumlah unit usaha sangat berkaitan erat dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Semakin banyak unit usaha yang beroperasi, maka kebutuhan akan tenaga kerja dalam industri tersebut juga akan meningkat (Syahputra, 2019).

Selain penyerapan tenaga kerja, kemiskinan juga erat kaitannya dengan fenomena pengangguran. Pengangguran merupakan individu yang termasuk dalam kategori angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu, namun belum berhasil memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Pengangguran terjadi ketika laju pertumbuhan angkatan kerja melebihi pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia. Pengangguran menjadi salah satu indikator utama dalam sektor ketenagakerjaan karena tingkat pengangguran mencerminkan sejauh mana angkatan kerja dapat terserap oleh pasar kerja. Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya berpotensi menjadi penyebab utama kemiskinan, tetapi juga dapat memicu meningkatnya tindak kriminal serta menghambat proses pembangunan dalam jangka panjang (Windra & Yudi Rafani, 2016). Berikut Perkembangan pengangguran di Pematang Siantar tahun 2014-2023.



Gambar 1.3 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Pematang Siantar tahun 2014-2023

Sumber : BPS Sumatera Utara

Dari Gambar 1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pematang Siantar 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari tahun 2014-2016 mengalami kenaikan dari 9,26 persen menjadi 11,5 persen tahun 2016. Tetapi pada tahun 2017 pengangguran menurun sampai di angka 8,8 persen dan kembali mengalami peningkatan ditahun 2018 menjadi 12,14 persen dan ditahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 11,5 persen. Sejak saat itu tren pengangguran sampai 2023 terus mengalami penurunan hingga mencapai 8,62 persen di tahun 2023.

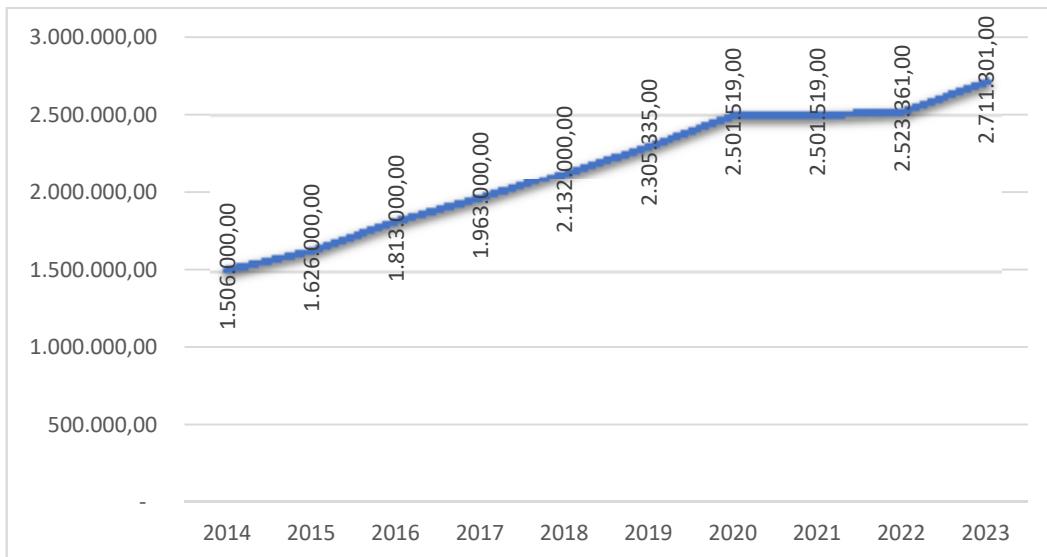
Pengangguran di tahun 2016 meningkat menjadi 11,5 persen tidak sesuai dengan tingkat kemiskinan yang menurun menjadi 9,9 persen tahun 2016. Sebaliknya pada tahun 2017 angka pengangguran yang turun menjadi 8,8 persen sementara kemiskinan meningkat menjadi 10,1 persen. Begitu pula di tahun 2018, tingkat pengangguran meningkat mencapai 12,14 persen sedangkan kemiskinan menurun menjadi 8,7 persen. Hal seperti itu juga terjadi pada tahun 2020 dan

2021 dimana penurunan pengangguran tidak di ikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan begitu juga sebaliknya

Penurunan tingkat pengangguran diharapkan mampu menekan angka kemiskinan. Hal ini sejalan dengan temuan Windra (2016), yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka kemiskinan cenderung meningkat. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Suaidah et al., (2023), yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Semakin besar jumlah pengangguran terbuka, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Salah satu faktor lain yang turut mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK). Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) merupakan standar upah minimum yang diberlakukan di tingkat kabupaten/kota. Penetapan upah minimum bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah, sekaligus memberikan jaminan bagi para investor agar tetap beroperasi diwilayah tersebut. Di sisi lain, UMK juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan dan pengalaman kerja, agar tidak mengalami perlakuan tidak adil dalam pemberian upah. Secara umum, UMK menjadi acuan bagi para pengusaha atau pelaku industri dalam menetapkan upah bagi pekerja, karyawan, atau buruh di lingkungan usahanya pada suatu periode tertentu di wilayah kabupaten atau

kota (Damanik & Rika Surianto Zaluku, 2021). Berikut Perkembangan Upah Minimum Kota Pematang Siantar tahun 2014-2023.



Gambar 1. 4 Perkembangan UMK Pematang Siantar tahun 2014-2023 (Rupiah)

Sumber : BPS Sumatera Utara, 2025

Dari Upah Minimum Kota Pematang Siantar selama kurun waktu 10 tahun terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar Rp. 1.506.000,00 juta sampai tahun 2020 Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) sebesar Rp. 2.501.519,00 hanya pada tahun 2021 yang tidak ada peningkatan ataupun penurunan akibat dari terjadinya covid-19, tetapi meningkat kembali sampai tahun 2023 menjadi Rp. 2.711.301,00. Tidak adanya kenaikan upah karena perusahaan yang berada pada kondisi tidak stabil dengan produksi yang menurun akibat daya beli masyarakat berkurang. Hal tersebut tidak memungkinkan adanya kenaikan upah, jika upah dinaikkan maka perusahaan akan mengalami kerugian yang berdampak fatal bagi tenaga kerja yang akan menjadi pengangguran, karena

banyaknya pertimbangan untuk menaikkan upah pada tahun 2021 pemerintah mengambil kebijakan dengan tidak adanya kenaikan upah pada saat itu.

Sedangkan kemiskinan mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014-2015 itu mengalami peningkatan begitu juga tahun 2017 kembali meningkat serta tahun 2021 yang meningkat. Diharapkan bahwa dengan meningkatnya upah minimum, pendapatan pekerja juga akan turut meningkat, sehingga kesejahteraan mereka dapat terjamin dan terhindar dari kondisi kemiskinan, tetapi hal ini tidak sinkron karena upah minimum kota pematang siantar yang terus mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2015,2017,2021 kemiskinan juga mengalami peningkatan.

Menurut penelitian Khabhibi (2011), Semakin tinggi upah minimum, maka pendapatan masyarakat pun cenderung meningkat, yang pada gilirannya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan membantu masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan. Begitu juga menurut penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana (2021), upah minimum kabupaten secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Madiun selama periode 2002 hingga 2019.

Dengan melihat fenomena-fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, diharapkan bahwa Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri, Pengangguran, dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dapat berperan dalam menekan angka kemiskinan di Kota Pematang Siantar. Jika penyerapan tenaga kerja sektor industri meningkat, maka dapat diamati apakah masyarakat miskin turut terserap bekerja di sektor tersebut. Penurunan pengangguran juga dapat menjadi indikasi

bahwa masyarakat miskin yang sebelumnya menganggur kini telah memperoleh pekerjaan. Sementara itu, peningkatan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Namun demikian, muncul pertanyaan apakah benar peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor industri, penurunan angka pengangguran, dan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) benar-benar mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Pematang Siantar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri, Pengangguran dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Terhadap Kemiskinan di Kota Pematang Siantar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor industri secara parsial terhadap kemiskinan di Kota Pematang Siantar?
2. Bagaimana pengaruh pengangguran secara parsial terhadap kemiskinan di Kota Pematang Siantar?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) secara parsial terhadap kemiskinan di Kota Pematang Siantar ?
4. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor industri, pengangguran dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) secara simultan terhadap kemiskinan di Kota Pematang Siantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian yaitu:

1. Mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor industri secara parsial terhadap kemiskinan di Kota Pematang Siantar.
2. Mengetahui pengaruh pengangguran secara parsial terhadap kemiskinan di Kota Pematang Siantar.
3. Mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) secara parsial terhadap kemiskinan di Kota Pematang Siantar.
4. Mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor industri, pengangguran dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) secara simultan terhadap kemiskinan di Kota Pematang Siantar.

1.4 Manfaat Penelitian

Keunggulan penelitian ini meliputi aspek teoritis dan praktis, khususnya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menggali ilmu sebanyak-banyaknya dan dapat dipraktekkan di kehidupan nyata serta dapat berbagi ilmu tersebut dengan yang lain. Khususnya mengenai kemiskinan, Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri, Pengangguran dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di Kota Pematang Siantar.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat dan memajukan ilmu pengetahuan, sehingga dapat menjadi sumber berharga untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang kemiskinan, pengangguran, penyerapan tenaga kerja

sektor industri, dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di Kota Pematang Siantar.

3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan evaluasi proses belajar - mengajar pada program studi dan dapat dijadikan referensi sebagai rekomendasi untuk penelitian dan memperoleh informasi tambahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan supaya adanya perhatian lebih dalam menangani kemiskinan di Kota Pematang Siantar.
2. Bagi swasta, sebagai sumber informasi untuk melakukan pengembangan penuntasan kemiskinan.
3. Bagi Masyarakat, hasil ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi untuk pengembangan dan keterampian, serta bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam kemiskinan di Kota Pematang Siantar.